



PEMERINTAH KOTA BIMA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno-Hatta No.02 Raba-Bima Kode Pos 84113 Nusa Tenggara Barat
Telp. (0374) 646441-646442, Fax. (0374) 646569

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA
NOMOR : 100.3.3.6/ 318 / VII /2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BIMA
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2025, perlu disusun dokumen perencanaan kerja Sekretariat Daerah Kota Bima untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

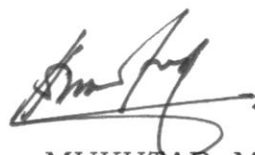
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 215, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 106);
10. Peraturan Walikota Bima Bima Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 820);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman untuk Sekretariat Daerah Kota Bima dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 15 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



Drs. MUKHTAR, M.H
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690531 199003 1 004

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima di Raba;
3. Kepala BPKAD Kota Bima di Raba.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA
NOMOR : 100.3.3.6/ 318 / VII /2024
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami diberikan kekuatan lahir dan batin untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, maka Rencana Kerja (*RENJA*) Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (*RENJA*) Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk membuat perencanaan kinerja selama 1 (*satu*) tahun terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024 - 2026.

Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026, yang merupakan pedoman utama perencanaan kegiatan Sekretariat Kota Bima.

Dengan dibagi-baginya tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu yang lebih pendek, yaitu tahunan, diharapkan rencana kerja ini dapat digunakan sebagai pedoman penganggaran maupun pelaksanaan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bima ini disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



Drs. MUKHTAR, M.H
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690531 199003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- Tabel 2.2. Evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2023
- Tabel 2.3. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024
- Tabel 3.1. Tujuan Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025
- Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025
- Tabel 3.3. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025
- Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bima mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat ;

- a. Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari Tujuan, Sasaran dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
- c. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis telah tercapai.

Mengingat arti strategis dokumen rencana kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahap penyusunan hingga penetapan dokumen rencana kerja harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bima ini disusun untuk dapat mewujudkan tujuan dan melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bima.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 111);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah untuk menyediakan suatu dokumen perencanaan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kota Bima dengan pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah yang menunjang Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Bima. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini diantaranya adalah:

- a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar program antar bagian di Sekretariat Daerah Kota Bima.
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar kegiatan di masing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kota Bima.
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan.
- d. Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bima adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasa hukum, maksud dan tujuan dan hubungan dengan dokumen perencanaan lain serta sistematika laporan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunn lalu berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi serta review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Sekretariat Daerah Kota Bima, program dan kegiatan menguraikan mengenai indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan Rumusan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bima adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatan pun terus dilakukan seiring dilakukannya revisi terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah, sehingga pada penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Sebelumnya terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan. Gambaran mengenai evaluasi capaian rencana strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pencapaian kinerja pelayanan sekretariat daerah Kota Bima.

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA					REALISASI / CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Nilai Sakip	-	-	(85,00)	(68,48)	(68,48)	(68,48)	(67,42)	(64,48)	A	A	A	A	
3	Nilai LPPD	-	-	Sangat Tinggi (3,2300)	Sedang (2,80)	Sedang (2,90)	Sedang (3,00)	Sedang (2,7091)	Sedang (2,80)	Sedang (2,80)	Sedang (2,80)	Sedang (2,80)	Sedang (2,80)	
4	Skor rata-rata IKM	-	-	A (88,50)	B (80,00)	B (85,00)	A (88,35)	A (88,50)	A (88,50)	A (88,50)	A (88,50)	A (88,50)	A (88,50)	
5	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase PD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase PD yang melakukan pengadaan barang dan jasa melalui ULP	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase kebijakan daerah bidang protokol dan komukasi pimpinan yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Indeks kerukunan umat beragama	-	-	80%	80%	82%	84%	80%	80%	80%	80%	82%	82%	

Terdapat perbaikan implementasi SAKIP, LPPD dan IKM diantaranya, perbaikan perencanaan tingkat Kota maupun SKPD, pengukuran kinerja, pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan evaluasi SAKIP dan LPPD SKPD. Indikator ini merupakan indikator Tujuan Sekretariat Daerah Kota Bima

Capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Bima tidak dapat diwujudkan tanpa dukungan kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sembilan Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bima. Evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bima ditampilkan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja				
		Target 2023				Porsentase
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100,00	Porsen	100,00	Porsen	100,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	100,00	Porsen	100,00	Porsen	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	Porsen	100,00	Porsen	100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120,00	Orang/bulan	120,00	Orang/bulan	100,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3,00	Dokumen	3,00	Dokumen	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	Laporan	1,00	Laporan	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18,00	Laporan	18,00	Laporan	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	Porsen	100,00	Porsen	100,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6,00	Dokumen	6,00	Dokumen	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	Porsen	100,00	Porsen	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	100,00

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0,00	Dokumen	0,00	Dokumen	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00	Laporan	12,00	Laporan	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54,00	Laporan	54,00	Laporan	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	Porsen	100,00	Porsen	100,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	58,00	Unit	58,00	Unit	100,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30,00	unit	30,00	unit	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	Porsen	100,00	Porsen	100,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,00	Laporan	4,00	Laporan	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	Laporan	12,00	Laporan	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	Laporan	12,00	Laporan	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100,00	Porsen	100,00	Porsen	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24,00	Unit	24,00	Unit	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28,00	Unit	28,00	Unit	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	211,00	Unit	211,00	Unit	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10,00	Unit	10,00	Unit	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang ipelihara/Direhabilitasi	3,00	Unit	3,00	Unit	100,00
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100,00	Porsen	100,00	Porsen	100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,00	Orang/Bulan	2,00	Orang/Bulan	100,00
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	100,00
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10,00	Orang	10,00	Orang	100,00

Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,00	Orang/Bulan	2,00	Orang/Bulan	100,00
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100,00	Porsen	100,00	Porsen	100,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	100,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	100,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	100,00
Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi	100,00	Porsen	100,00	Porsen	100,00
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10,00	Dokumen	10,00	Dokumen	100,00
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1,00	Laporan	1,00	Laporan	100,00
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2,00	Dokumen	2,00	Dokumen	100,00
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4,00	Dokumen	4,00	Dokumen	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2,00	Dokumen	2,00	Dokumen	100,00
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100,00	Porsen	100,00	Porsen	100,00
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	900,00	Laporan	900,00	Laporan	100,00
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	10,00	Laporan	10,00	Laporan	100,00
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12,00	Laporan	12,00	Laporan	100,00
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		100,00	Porsen	100,00	Porsen	100,00
Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Tata Pemerintahan	100,00	Porsen	100,00	Porsen	100,00
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	21,00	Dokumen	21,00	Dokumen	100,00
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6,00	Dokumen	6,00	Dokumen	100,00
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4,00	Dokumen	4,00	Dokumen	100,00
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100,00	Porsen	100,00	Porsen	100,00
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13,00	Dokumen	13,00	Dokumen	100,00
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	3,00	Dokumen	3,00	Dokumen	100,00

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4,00	Dokumen	4,00	Dokumen	100,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	4,00	Dokumen	0,00	Dokumen	100,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4,00	Dokumen	4,00	Dokumen	100,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bima sebagai Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan SKPD dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kota Bima adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman aparat pemerintah terhadap Tugas dan Fungsi mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat pemerintah yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
5. Adanya aplikasi pengolahan data yang memadai untuk penemuan kembali surat masuk dan surat keluar Sekretariat Daerah.
6. Terbatasnya ruang penyimpanan arsip

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Kota Bima adalah sebagai berikut:

1. Adanya penafsiran yang berbeda terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan ego sektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak pada Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
4. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sering berubah dan berubah dalam jangka waktu yang pendek dan tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi yang berbeda-beda.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah Kota Bima dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kinerja Kota Bima pada tahun 2022 mendapat nilai 68,17 sedangkan nilai 2023 mendapat nilai 67,42 dengan point B. Hal tersebut memacu Pemerintah Kota Bima untuk lebih meningkatkan lagi akuntabilitas kinerjanya di tahun 2024 dan tahun-tahun mendatang.
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mulai didengungkan memerlukan perhatian lebih dari semua pihak di Sekretariat Daerah sebagai leading sektor dan seluruh Pemerintah Kota Bima, dan ini merupakan tantangan tersendiri terhadap team perencana Sekretariat Daerah agar dapat benar-benar mempersiapkan implementasi Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah kedalam dokumen perencanaan.
3. Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada SKPD, sehingga pada survey kepuasan pelanggan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia, Kota Bima masih memperoleh point 86,89 pada tahun 2022 merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tingkat kepuasan Tinggi dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan perolehan point 88,05.
4. Masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota dimulai pada tahun 2025 yang menandakan tahun awal RPJMD Walikota dan Wakil Walikota terpilih, hal tersebut juga merupakan suatu tantangan, dimana dokumen perencanaan nantinya harus dapat mengakomodir Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Bima dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

Bagian Pemerintahan :

1. Belum seluruh Perangkat Daerah menyampaikan Data Pendukung Indikator Kinerja Kunci untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tepat waktu sesuai dengan urusan yang dilaksanakan pada masing-masing PD.
2. Beberapa Data pendukung yang disampaikan belum lengkap dan tidak sesuai dengan format IKK

Bagian Kesejahteraan Rakyat :

1. Belum maksimalnya koordinasi terkait Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Kota Bima sesuai Program UHC (Universal Health Coverage)
2. Belum maksimalnya koordinasi terkait kegiatan dibidang Sosial dan Budaya.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam :

1. Masih adanya ego sektoral di masing-masing PD terkait dalam upaya pengendalian inflasi.
2. Pemahaman PD dan instansi terkait masih lemah tentang inflasi daerah dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Lemahnya data/informasi yang dimiliki oleh PD teknis sehingga pelaporan tidak bisa maksimal
4. Kurangnya sumberdaya manusia kualitas dan kuantitas sehingga cukup menghambat proses pelaksanaan tugas.

Bagian Administrasi Pembangunan :

1. Dalam pelaksanaan Inspeksi masih adanya Paket pembangunan yang tidak sesuai dengan spek dan secedule penyelesaian.
2. Dalam pelaksanaan Temu wirasa terkadang undangan yang hadir melebihi dari undangan sehingga berakibat kekurangan persediaan makan dan minum

Bagian Umum :

1. Dalam pelaksanaan langkah - langkah proaktif guna mencapai visi dan misi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bima terdapat beberapa kendala yang harus diberikan perhatian guna peningkatan kinerja pada tahun - tahun selanjutnya. Kendala pertama bersumber pada kualitas sumber daya manusia yang dituntut untuk menguasai keahlian pada bidang yang menjadi tanggung jawab masing - masing personil. Dalam pengelolaan administrasi yang sangat bersentuhan dengan pengorganisasian file-file maupun surat-surat dinas sangat membutuhkan tenaga arsiparis yang handal demi terkelolanya tatanan arsip yang sistematis, efektif dan efisien.
2. Penguasaan teknologi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Sistem teknologi merupakan katalisator sistem kerja yang dapat membantu dari beberapa aspek antara lain penghematan waktu, biaya, tenaga, dan terjaminnya akurasi data guna menyajikan laporan yang akuntabel. Keterbatasan ruang untuk penyimpanan dan pengelolaan arsip dan informasi juga menjadikan kendala membutuhkan solusi pemecahan.
3. Belum tercapainya pelayanan yang maksimal terhadap pemenuhan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Organisasi :

1. Belum seluruh SKPD menyampaikan Laporan Kinerja sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Belum seluruh SKPD menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2018 tepat waktu.
3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis Tingkat SKPD.
4. Belum optimalnya penyusunan SOP di masing-masing SKPD.
5. Belum optimalnya pencapaian SPM ditingkat SKPD.
6. Belum optimalnya penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah yang dapat mencerminkan kebutuhan dan beban kerja perangkat daerah secara objektif.
7. Pembentukan Perangkat Daerah hendaknya didasarkan terhadap Analisa kebutuhan organisasi dan memepertimbangkan prinsip-prinsip manajemen yang baik sehingga dapat berkinerja dengan maksimal. Namun beberapa Struktur Perangkat Daerah memerlukan Revisi karena belum dapat memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan internal maupun eksternal pelaksanaan birokrasi.
8. Uraian tugas perangkat daerah merupakan kiblat Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan maupun tugas dan tanggungjawabnya, namun beberapa uraian tugas perangkat daerah tumpang tindih baik antara perangkat daerah maupun didalam internal perangkat daerah, sehingga seringkali tidak dapat menjadi suatu kiblat dalam menentukan Batasan wewenang antar perangkat daerah, maupun antar sub bagian organisasi didalam perangkat daerah.

Pada tingkat teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia pada bagian/unit kerja masih kurang.
2. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja dan peralatan yang digunakan belum dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sekretariat Daerah Kota Bima termasuk dalam salah satu prioritas pembangunan Kota Bima yaitu Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Bima dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Bima sebagaimana Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Kinerja					
		Target 2024				Pagu Indikatif	
		Semula		Menjadi		RKPD 2024	APBD 2024
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100,00	Porsen	100,00	Porsen	25.983.353.823,00	29.079.277.358,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	100,00	Porsen	100,00	Porsen	12.504.000,00	12.504.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	1.648.000,00	1.648.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	2.714.000,00	2.714.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	2.714.000,00	2.714.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	2.714.000,00	2.714.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	2.714.000,00	2.714.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	Porsen	100,00	Porsen	13.841.465.622,00	16.310.410.167,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120,00	Orang/bulan	120,00	Orang/bulan	13.205.893.122,00	15.674.837.667,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3,00	Dokumen	3,00	Dokumen	630.939.500,00	630.939.500,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	Laporan	1,00	Laporan	1.843.000,00	1.843.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18,00	Laporan	18,00	Laporan	2.790.000,00	2.790.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	Porsen	100,00	Porsen	13.234.200,00	15.334.200,00

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6,00	Dokumen	6,00	Dokumen	13.234.200,00	15.334.200,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	Porsen	100,00	Porsen	1.487.736.136,00	1.526.736.376,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	63.889.100,00	63.889.100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	94.710.075,00	94.710.075,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	59.073.900,00	74.391.900,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0,00	Dokumen	0,00	Dokumen	0,00	0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00	Laporan	12,00	Laporan	946.513.050,00	942.147.050,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54,00	Laporan	54,00	Laporan	323.550.011,00	351.598.251,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00		100,00	Porsen	1.900.000,00	1.325.580.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	58,00	Unit	58,00	Unit	1.000.000,00	1.150.000.000,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30,00	unit	30,00	unit	900.000,00	175.580.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	Porsen	100,00	Porsen	3.276.982.880,00	2.799.715.880,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,00	Laporan	4,00	Laporan	292.264.900,00	295.564.900,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	Laporan	12,00	Laporan	1.355.455.800,00	769.888.800,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	Laporan	12,00	Laporan	1.629.262.180,00	1.734.262.180,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100,00	Porsen	100,00	Porsen	1.713.868.000,00	1.584.473.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24,00	Unit	24,00	Unit	450.630.000,00	450.630.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28,00	Unit	28,00	Unit	653.470.000,00	653.470.000,00

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	211,00	Unit	211,00	Unit	201.210.000,00	201.210.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10,00	Unit	10,00	Unit	339.492.000,00	210.097.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang ipelihara/Direhabilitasi	3,00	Unit	3,00	Unit	69.066.000,00	69.066.000,00
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100,00	Porsen	100,00	Porsen	1.182.399.585,00	1.182.399.585,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,00	Orang/Bulan	2,00	Orang/Bulan	521.399.585,00	521.399.585,00
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	81.000.000,00	81.000.000,00
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10,00	Orang	10,00	Orang	180.000.000,00	180.000.000,00
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,00	Orang/Bulan	2,00	Orang/Bulan	400.000.000,00	400.000.000,00
Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitas Kerumahtangaan Sekretarit Daerah	100,00	Porsen	100,00	Porsen	1.464.111.900,00	1.173.972.900,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	1.039.808.000,00	1.010.008.000,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	261.801.000,00	1.462.000,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	162.502.900,00	162.502.900,00
Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi	100,00	Porsen	100,00	Porsen	440.378.500,00	449.378.250,00
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10,00	Dokumen	10,00	Dokumen	188.266.200,00	197.265.950,00
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1,00	Laporan	1,00	Laporan	63.128.300,00	63.128.300,00
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2,00	Dokumen	2,00	Dokumen	63.065.650,00	63.065.650,00
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4,00	Dokumen	4,00	Dokumen	62.904.000,00	62.904.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah	2,00	Dokumen	2,00	Dokumen	63.014.350,00	63.014.350,00

Daerah							
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100,00	Porsen	100,00	Porsen	2.548.773.000,00	2.698.773.000,00
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	900,00	Laporan	900,00	Laporan	1.666.060.000,00	1.816.060.000,00
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	10,00	Laporan	10,00	Laporan	541.582.500,00	541.582.500,00
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12,00	Laporan	12,00	Laporan	341.130.500,00	341.130.500,00
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		100,00		100,00		13.640.628.890,00	14.452.018.150,00
Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Tata Pemerintahan	100,00	Porsen	100,00	Porsen	950.479.190,00	1.925.476.750,00
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	21,00	Dokumen	21,00	Dokumen	334.483.050,00	500.229.550,00
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6,00	Dokumen	6,00	Dokumen	269.263.240,00	978.515.300,00
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4,00	Dokumen	4,00	Dokumen	346.732.900,00	446.731.900,00
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100,00	Porsen	100,00	Porsen	11.730.959.700,00	11.438.958.400,00
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13,00	Dokumen	13,00	Dokumen	11.383.386.800,00	10.358.985.500,00
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3,00	Dokumen	3,00	Dokumen	189.739.100,00	219.139.100,00
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2,00	Dokumen	2,00	Dokumen	157.833.800,00	860.833.800,00
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100,00	Porsen	100,00	Porsen	959.190.000,00	1.087.583.000,00
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	655,00	Dokumen	655,00	Dokumen	483.682.000,00	511.435.000,00
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2,00	Kasus	2,00	Kasus	296.672.000,00	274.232.000,00

Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	90,00	Dokumen	90,00	Dokumen	178.836.000,00	301.916.000,00
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100,00		100,00		2.111.897.960,00	2.951.976.250,00
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100,00	Porsen	100,00	Porsen	398.378.600,00	448.378.600,00
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5,00	Dokumen	5,00	Dokumen	73.726.300,00	73.726.300,00
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4,00	Laporan	4,00	Laporan	199.394.700,00	249.394.700,00
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8,00	Dokumen	8,00	Dokumen	68.815.000,00	68.815.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	56.442.600,00	56.442.600,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	0,00	0,00
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	100,00	Porsen	100,00	Porsen	1.200.656.060,00	1.254.984.750,00
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	73.706.250,00	73.706.250,00
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6,00	Laporan	6,00	Laporan	979.724.310,00	1.034.053.000,00
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16,00	Laporan	16,00	Laporan	147.225.500,00	147.225.500,00
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100,00	Porsen	100,00	Porsen	400.875.000,00	1.136.624.600,00
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	72,00	Dokumen	72,00	Dokumen	97.882.400,00	228.814.100,00
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	32,00	Dokumen	32,00	Dokumen	145.667.700,00	353.968.500,00
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	46,00	Orang	46,00	Orang	157.324.900,00	553.842.000,00
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	100,00	Porsen	100,00	Porsen	111.988.300,00	111.988.300,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4,00	Dokumen	4,00	Dokumen	34.286.900,00	34.286.900,00

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	4,00	Dokumen	4,00	Dokumen		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4,00	Dokumen	4,00	Dokumen	77.701.400	77.701.400,00
						41.735.880.673	46.483.271.758

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengingat peranan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, Sekretariat Daerah tidak langsung menjalankan program dan kegiatan masyarakat. Peranan Sekretariat Daerah adalah mengoordinasikan usulan-usulan masyarakat yang masuk ke Sekretariat Daerah kepada instansi teknis yang menangani.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengusung tema “*Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas*” yang diimplementasikan dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air.
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Salah satu program prioritas terkait tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bima adalah prioritas Reformasi Birokrasi yang akan mulai digarap sebagai upaya dukungan terhadap pencapaian program nasional. Selain pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat Daerah Kota Bima juga akan meningkatkan peran pada kebijakan-kebijakan terkait pelayanan publik. Tabel 3.2 menyajikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bima.

Dalam upaya mendukung peran Kota Bima dalam membangun Daerah yang selaras dengan arah prioritas pembangunan nasional, Sekretariat Daerah Kota Bima mendukung melalui:

1. Prioritas Pangan dan Prioritas Perdagangan (Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan di Kota Bima, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bima turut mendukung melalui kebijakan stabilisasi harga bahan pangan, dimana Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bima melakukan monitoring terhadap harga bahan pokok dan selanjutnya jika ditemukan harga bahan pangan diatas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan, dilakukan upaya berupa pelaksanaan pasar murah di titik-titik yang berpotensi menjadi suatu titik rawan peningkatan harga bahan pangan pokok.

2. Prioritas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka mendukung program pemerintah dibidang pengembangan UMKM dan Lembaga Ekonomi Mikro lainnya Bagian Perekonomian membentuk Tim Monev KUR dan Tim Monitoring Penyertaan Modal Daerah. Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah melakukan monitoring dan evaluasi sejauhmana kebijakan pemerintah mampu berkinerja sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Prioritas Pengelolaan Pengawasan Perkotaan

Dalam rangka mendukung program nasional pengelolaan pengawasan perkotaan, Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan yang disinergikan dalam pelaksanaan Inspeksi Kegiatan Pembangunan di Kota Bima Bersama Kepala Daerah. Hal ini merupakan suatu dukungan dalam bidang pengawasan perkotaan.

4. Prioritas Otonomi Daerah dan Desentralisasi

a. Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka mendukung prioritas otonomi daerah dan desentralisasi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bima mendukung melalui pembentukan produk hukum daerah yang responsif, akomodatif dan akuntabel. Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, fokus yang ingin dicapai oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bima adalah menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan serta meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan instansi pemerintah.

b. Evaluasi Perangkat Daerah

Peningkatan efektivitas tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan suatu tantangan bagi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bima, dimana fokus penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Standar Operasional Prosedur, Sistem Kerja, Budaya Kerja dan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah belum terselenggara secara maksimal. Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, fokus evaluasi Perangkat Daerah ini juga diarahkan untuk menurunkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal instansi pemerintah serta meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Kedua hal tersebut juga merupakan suatu penguat dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

c. Penyusunan dan Evaluasi Mandiri Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta penyusunan publikasi ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Bima. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026, maka selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana deskripsi pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pengaruh kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatkan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	100
2.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	2. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip	68,48
3.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah	3. Meningkatkan Fasilitasi Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah	Nilai LPPD	2,90
4.	Tertatanya Produk Hukum Daerah	4. Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100
5.	Meningkatkan Pengendalian Administrasi Pembangunan	5. Meningkatkan kepatuhan PD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan	Persentase PD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu	100
		6. Meningkatkan akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Rasio Nilai Beanja yang dilakukan melalui pengadaan	29,30
6.	Meningkatkan pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	7. Meningkatkan pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	persentase kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan yang ditindaklanjuti	100
7.	meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan sarana prasarana pendukung kinerja aparatur	8. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekretariat Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	100
8.	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	9. Meningkatkan pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama	82

Sumber : Renstra Setda Kota Bima 2024-2026

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, dalam sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Bima telah ditetapkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun 2025	Program Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pengaruh kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatkan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	100	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 3. Program Perekonomian dan Pembangunan
2.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	2. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip	68,48	
3.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah	3. Meningkatkan Fasilitasi Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah	Nilai LPPD	2,90	
4.	Tertatanya Produk Hukum Daerah	4. Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100	
5.	Meningkatkan Pengendalian Administrasi Pembangunan	5. Meningkatkan kepatuhan PD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan	Persentase PD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu	100	
		6. Meningkatkan akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Rasio Nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	29,30	
6.	Meningkatkan pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	7. Meningkatkan pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	persentase kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan yang ditindaklanjuti	100	

7.	meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan sarana prasarana pendukung kinerja aparatur	8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekretariat Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	100
8.	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	9. Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama	82

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka direncanakan program dan kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Bima adalah sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3.3.
Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana
		Target 2025				
		Lokasi	Target			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Kota Bima	100,00	Porsen	29.079.277.358,00	DAU
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Kota Bima	100,00	Porsen	12.504.000,00	DAU
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	1,00	Dokumen	1.648.000,00	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	1,00	Dokumen	2.714.000,00	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	1,00	Dokumen	2.714.000,00	DAU
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Bima	1,00	Dokumen	2.714.000,00	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	1,00	Dokumen	2.714.000,00	DAU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bima	100,00	Porsen	16.310.410.167,00	DAU
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	120,00	Orang/bulan	15.674.837.667,00	DAU
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	3,00	Dokumen	630.939.500,00	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	1,00	Laporan	1.843.000,00	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima	18,00	Laporan	2.790.000,00	DAU
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bima	100,00	Porsen	15.334.200,00	DAU
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Bima	6,00	Dokumen	15.334.200,00	DAU
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bima	100,00	Porsen	1.526.736.376,00	DAU

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bima	1,00	Paket	63.889.100,00	DAU
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bima	1,00	Paket	94.710.075,00	DAU
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bima	1,00	Paket	74.391.900,00	DAU
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Bima	0,00	Dokumen	0,00	DAU
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Bima	12,00	Laporan	942.147.050,00	DAU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	54,00	Laporan	351.598.251,00	DAU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	100,00	Porsen	1.325.580.000,00	DAU
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Bima	58,00	Unit	1.150.000.000,00	DAU
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Bima	30,00	unit	175.580.000,00	DAU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	100,00	Porsen	2.799.715.880,00	DAU
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	4,00	Laporan	295.564.900,00	DAU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bima	12,00	Laporan	769.888.800,00	DAU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bima	12,00	Laporan	1.734.262.180,00	DAU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Bima	100,00	Porsen	1.584.473.000,00	DAU
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Bima	24,00	Unit	450.630.000,00	DAU
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bima	28,00	Unit	653.470.000,00	DAU
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bima	211,00	Unit	201.210.000,00	DAU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bima	10,00	Unit	210.097.000,00	DAU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang ipelihara/Direhabilitasi	Kota Bima	3,00	Unit	69.066.000,00	DAU
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bima	100,00	Porsen	1.182.399.585,00	DAU
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bima	2,00	Orang/Bulan	521.399.585,00	DAU

Penyediaan Pakaiannya Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaiannya Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Bima	1,00	Paket	81.000.000,00	DAU
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bima	10,00	Orang	180.000.000,00	DAU
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bima	2,00	Orang/Bulan	400.000.000,00	DAU
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Bima	100,00	Porsen	1.173.972.900,00	DAU
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Bima	1,00	Paket	1.010.008.000,00	DAU
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Bima	1,00	Paket	1.462.000,00	DAU
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kota Bima	1,00	Paket	162.502.900,00	DAU
Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi	Kota Bima	100,00	Porsen	449.378.250,00	DAU
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Bima	10,00	Dokumen	197.265.950,00	DAU
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Bima	1,00	Laporan	63.128.300,00	DAU
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Bima	2,00	Dokumen	63.065.650,00	DAU
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Bima	4,00	Dokumen	62.904.000,00	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Bima	2,00	Dokumen	63.014.350,00	DAU
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Bima	100,00	Porsen	2.698.773.000,00	DAU
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kota Bima	900,00	Laporan	1.816.060.000,00	DAU
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Bima	10,00	Laporan	541.582.500,00	DAU
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Bima	12,00	Laporan	341.130.500,00	DAU
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kota Bima	Kota Bima	100,00		14.452.018.150,00	DAU
Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Tata Pemerintahan	Kota Bima	100,00	Porsen	1.925.476.750,00	DAU
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Bima	21,00	Dokumen	500.229.550,00	DAU
Pengelolaan Administrasi Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Wilayah	Kota Bima	6,00	Dokumen	978.515.300,00	DAU
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Bima	4,00	Dokumen	446.731.900,00	DAU

<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Bima	100,00	Porsen	11.438.958.400,00	DAU
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Bima	13,00	Dokumen	10.358.985.500,00	DAU
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kota Bima	3,00	Dokumen	219.139.100,00	DAU
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kemudahan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Limas	Kota Bima	2,00	Dokumen	860.833.800,00	DAU
<i>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Bima	100,00	Porsen	1.087.583.000,00	DAU
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kota Bima	655,00	Dokumen	511.435.000,00	DAU
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Bima	2,00	Kasus	274.232.000,00	DAU
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kota Bima	90,00	Dokumen	301.916.000,00	DAU
<i>Program Perencanaan Dan Pembangunan</i>	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Kota Bima	100,00	Porsen	2.951.976.250,00	DAU
<i>Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan</i>	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan	Kota Bima	100,00	Porsen	448.378.600,00	DAU
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Bima	5,00	Dokumen	73.726.300,00	DAU
Pengendalian dan Distribusi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perencanaan	Kota Bima	4,00	Laporan	249.394.700,00	DAU
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kota Bima	8,00	Dokumen	68.815.000,00	DAU
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kota Bima	1,00	Dokumen	56.442.600,00	DAU
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kota Bima	1,00	Dokumen	0,00	DAU
<i>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>	Persentase Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	Kota Bima	100,00	Porsen	1.254.984.750,00	DAU
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kota Bima	1,00	Dokumen	73.706.250,00	DAU
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Bima	6,00	Laporan	1.034.053.000,00	DAU
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Bima	16,00	Laporan	147.225.500,00	DAU
<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Bima	100,00	Porsen	1.136.624.600,00	DAU
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Bima	72,00	Dokumen	228.814.100,00	DAU

Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Bima	32,00	Dokumen	353.968.500,00	DAU
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Bima	46,00	Orang	553.842.000,00	DAU
<i>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</i>	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Bima	100,00	Porsen	111.988.300,00	DAU
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kota Bima	4,00	Dokumen	34.286.900,00	DAU
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kota Bima	4,00	Dokumen		DAU
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kota Bima	4,00	Dokumen	77.701.400,00	DAU
					46.483.271.758,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan, indikator dan target perencanaan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada table 4.1

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target	
4 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							18.896.742.641			19.841.579.773
4 1 1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya Tertib administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	120 Orang/bulan	100 persen	18.265.803.141	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	19.179.093.298
4 1 1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terwujudnya Tertib administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	3 Dokumen	100 persen	630.939.500	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	662.486.475
4 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							15.334.200			16.100.910
4 1 1 2.05	3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	6 Dokumen	100 persen	15.334.200	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	16.100.910
4 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.526.736.376			1.603.073.195
4 1 1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terwujudnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai	100 persen	1 Paket	100 persen	63.889.100	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	67.083.555
4 1 1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terwujudnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai	100 persen	1 Paket	100 persen	94.710.075	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	99.445.579

4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 porsen	1 Paket	100 porsen	74.391.900	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	78.111.495
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 porsen	12 Laporan	100 porsen	942.147.050	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	989.254.403
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 porsen	54 Laporan	100 porsen	351.598.251	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	369.178.164
4	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
4	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100 porsen	58 Unit	100 porsen	-	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	-
4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 porsen	10 Unit	100 porsen	-	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	-
4	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 porsen	4 Laporan	100 porsen	295.564.900	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	310.343.145
												2.773.715.880	2.912.401.674	

4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terwujudnya layanan jasa Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah yang memadai	100 persen	12 Laporan	100 persen	769.888.800	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	808.383.240
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terwujudnya layanan jasa Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah yang memadai	100 persen	12 Laporan	100 persen	1.708.262.180	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	1.793.675.289
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terperuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	24	100 persen	450.630.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	473.161.500
4	1	1	2.09	2	Perorangan Dinas atau Kendaraan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terperuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	28 Unit	100 persen	653.470.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	686.143.500
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terperuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	211 Unit	100 persen	201.210.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	211.270.500
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terperuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	10 Unit	100 persen	210.097.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	220.601.850
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terperuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	3 Unit	100 persen	69.066.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	72.519.300
														1.584.473.000	1.663.696.650

4	1	1	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							1.182.399.585		1.241.519.564		
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terwujudnya Tertib administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	2 Orang/Bulan	100 persen	521.399.585	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	547.469.564
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Terwujudnya Tertib administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	1 Paket	100 persen	81.000.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	85.050.000
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terwujudnya Tertib administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	10 Orang	100 persen	180.000.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	189.000.000
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terwujudnya Tertib administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	2 Orang/Bulan	100 persen	400.000.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	420.000.000
4	1	1	2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah							1.173.972.900		2,062,178,347		
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 persen	1 Paket	100 Porsen	1010008000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	1.060.508.400

4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtang- gaan Sekretariat Daerah	100 persen	1 Paket	100 Porsen	1462000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	1.535.100
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtang- gaan Sekretariat Daerah	100 persen	1 Paket	100 Porsen	162502900	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	170.628.045
4	1	1	2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								2.698.773.000		2.833.711.650	
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 persen	900 Laporan	100 persen	1.816.060.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	1.906.863.000
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 persen	10 Laporan	100 persen	541.582.500	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	568.661.625
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Laporan Pendokumentasia n Tugas Pimpinan	Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 persen	12 Laporan	100 persen	341.130.500	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	358.187.025
4	1	1	2.13	Penataan Organisasi								449.378.250		471.847.163	
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Penataan Organisasi	100 persen	10 Dokumen	100 persen	197265950	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	207.129.248
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Penataan Organisasi	100 persen		100 persen	63128300	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	66.284.715

4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Penataan Organisasi	100 persen	2 Dokumen	100 persen	63065650	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	66.218.933
4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Penataan Organisasi	100 persen	4 Dokumen	100 persen	62904000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	66.049.200
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penataan Organisasi	100 persen	2 Dokumen	100 persen	63014350	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	66.165.068
4	1	3	2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								448.378.600			470.797.530

4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terseleenggaranya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 persen	5 Dokumen	100 persen	73726300	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 persen	77.412.615
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terseleenggaranya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 persen	4 Laporan	100 persen	249394700	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 persen	261.864.435
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terseleenggaranya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 persen	8 Dokumen	100 persen	68815000	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 persen	72.255.750
4	1	3	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Terseleenggaranya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 persen	1 Dokumen	100 persen	55442600	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 persen	58.214.730

4	1	3	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 persen	1 Dokumen	100 persen	1000000	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 persen	1.050.000
4	1	3	2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam								111.988.300		117.587.715	
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Terselenggaranya Kebijakan Sumber Daya Alam	100 persen	4 Dokumen	100 persen	34.286.900	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 persen	36.001.245
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Terselenggaranya Kebijakan Sumber Daya Alam	100 persen	4 Dokumen	100 persen		Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 persen	-
4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Terselenggaranya Kebijakan Sumber Daya Alam	100 persen	4 Dokumen	100 persen	77.701.400	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 persen	81.586.470
4	1	2	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								10.913.958.400		11.459.656.320	

4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	13 Dokumen	100 persen	9.833.985,500	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	10.325.684,775
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	3 Dokumen	100 persen	219.139,100	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	230.096,055
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan,	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	2 Dokumen	100 persen	860.833,800	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	903.875,490
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum							1.087.583,000			1.141.962,150

4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 persen	655 Dokumen	100 persen	511435000	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	537.006.750
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 persen	2 Kasus	100 persen	274232000	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	287.943.600
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 persen	90 Dokumen	100 persen	301916000	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	317.011.800

4 1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.504.000 13.129.200

4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100 persen	1 Dokumen	100 persen	1.648.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	1.730.400
4	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terwujudnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100 persen	1 Dokumen	100 persen	2.714.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	2.849.700

4	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terwujudnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100 persen	1 Dokumen	100 persen	2.714.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	2.849.700
4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terwujudnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100 persen	1 Dokumen	100 persen	2.714.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	2.849.700
4	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terwujudnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100 persen	1 Dokumen	100 persen	2.714.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	2.849.700
4	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.633.000		4.864.650	
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	1 Laporan	100 persen	1.843.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	1.935.150
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	18 Laporan	100 persen	2.790.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	2.929.500
4	1	3	2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								1.254.984.750		1.317.733.988	

4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Terlaksanya Administrasi Pembangunan	100 persen	1 Dokumen	100 persen	73.706.250	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 persen	77.391.563
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksanya Administrasi Pembangunan	100 persen	6 Laporan	100 persen	1.034.053.000	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 persen	1.085.755.650
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksanya Administrasi Pembangunan	100 persen	16 Laporan	100 persen	147.225.500	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 persen	154.586.775
4	1	2	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan								1.225.476.750	1.286.750.588		
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksanya Administrasi Tata Pemerintahan	100 persen	7 Dokumen	100 persen	600.229.550	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 persen	630.241.028
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksanya Administrasi Tata Pemerintahan	100 persen	3 Dokumen	100 persen	278.515.300	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 persen	292.441.065
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksanya Administrasi Tata Pemerintahan	100 persen	5 Dokumen	100 persen	346.731.900	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 persen	364.068.495
4	1	3	2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								698.102.600	733.007.730		
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 persen	72 Dokumen	100 persen	225.814.100	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 persen	237.104.805
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 persen	36 dokumen	100 persen	150.096.500	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 persen	157.601.325
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 persen	46 Orang	100 persen	322.192.000	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 persen	338.301.600

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah tahun 2024 – 2026. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Bima dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Kota Bima yang telah ditetapkan pada tahun 2024 maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

Lebih dari sekedar memenuhi amanah Peraturan Perundang-Undangan, dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar Sekretariat Daerah Kota Bima memiliki dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2025. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis.

Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bima, meskipun perlu disampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif, dimana dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Penyusunan Rencana Kerja ini tentu masih memerlukan penyempurnaan dimasa mendatang, oleh karenanya saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen renja dimasa mendatang. Lebih lanjut, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah pada Tahun 2025.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



Drs. MUKHTAR, M.H
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690531 199003 1 004